



**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA
PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

Nama : Mochamad Naufal Aripin

NIM : 1610611031



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**



**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI
LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK
PRANCIS DAN DPD RI**

SKRIPSI

MOCHAMAD NAUFAL ARIPIN

1610611031

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI
LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK
PRANCIS DAN DPD RI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

MOCHAMAD NAUFAL ARIPIN

1610611031

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA
PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI**

MOCHAMAD NAUFAL ARIPIN

1610611031

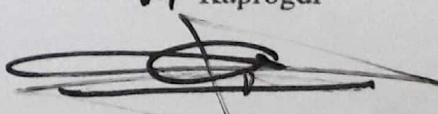
Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 13 Desember 2019

Mengetahui,


Dekan


Dr. Abdul Halim, M.Ag.
NIP.196706081994031005


Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.

(Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.)
NIP.198708272018032001

Pembimbing


(Muhammad Helmi Fahrozi, S.HI., S.H., M.H.)
NIK.2151221195

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mochamad Naufal Aripin

NPM : 1610611031

Tanggal : 13 Desember 2019

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Naufal Aripin

NPM : 1610611031

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI
LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS
DAN DPD RI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 03 April 2020

Yang menyatakan,



(Mochamad Naufal Aripin)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Mochamad Naufal Aripin
NPM : 1610611031
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul : Analisa Perbandingan Penguatan Fungsi Legislasi
Lembaga Perwakilan Majelis Nasional Republik Prancis
Dan DPD RI

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Fauziah, S.H., M.H. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H., S.H., M.H.

Anggota I

Anggota II

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn

Dekan

an - Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 03 April 2020

ANALISA PERBANDINGAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI LEMBAGA PERWAKILAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI

Mochamad Naufal Aripin

Abstrak

Republik Indonesia dan Republik Prancis memiliki kesamaan dalam hal menjalankan sistem pemerintahan dengan pembagian sistem kekuasaan demi terciptanya keselarasan selanjutnya bentuk kesatuan adalah hal fundamental kedua negara. Dalam struktur pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan merupakan unsur yang penting untuk merespon realitas sosial pembentukan lembaga perwakilan haruslah sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menghindari terjadinya kesewenangan kekuasaan, metode perbandingan dua lembaga legislatif yaitu antara Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Nasional Republik Prancis dengan tujuan mencari tahu kelebihan dan manfaat kamar kedua negara Prancis yang kemudian dapat menjadi usulan kepada Dewan Perwakilan Daerah, Teori parlemen bikameral Montesquieu menjadi asas akan fungsi majelis tinggi dan majelis rendah lembaga legislatif dalam hal legislasi dan urgensinya yang menghasilkan utilitarianisme kebijakan undang-undang dengan aspek Hak Asasi Manusia masyarakat daerah yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dengan bijaksana, fungsi Dewan Perwakilan Daerah banyak tereduksi melalui undang-undang khusus UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali dengan putusan No. 92/PUU-X/2012 dan putusan No. 79/PUU-XII/2014. Salah satu fungsi kelebihan yang dimiliki Majelis Nasional Republik Prancis adalah dapat merumuskan dan menetapkan undang-undang.

Kata kunci : *Indonesia, Prancis, Lembaga Perwakilan*

ANALYSIS OF STRENGTHENING LEGISLATION FUNCTION OF NATIONAL ASSEMBLY INSTITUTIONAL REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF FRANCE AND DPD RI

Mochmad Naufal Aripin

Abstract

The Republic of Indonesia and The French Republic have in common in terms of running a system of government with the distribution of power systems for the sake of creating further harmony, the form of unity is fundamental to the two countries. In the structure of democratic government, representative institutions are an important element to respond to the social reality of the formation of representative institutions must be in accordance with the duties, functions and authorities to realize good governance and avoid the abuse of power, method of comparison of the two legislative institutions between the Dewan Perwakilan Daerah and the National Assembly of the French Republic with the aim of finding out the advantages and benefits of the second chambers of France which could then be proposed to the Dewan Perwakilan Daerah. Montesquieu's bicameral parliamentary theory becomes the principle of the function of the upper house and the lower house of the legislative institutions in terms of legislation and its urgency, which results will make the utilitarianism of the legal policies with aspects of human rights that are just with civilized and populist regions led wisely by wisdom. The functions of the Dewan Perwakilan Daerah have been greatly reduced through the special law that is Art Number 17 Year 2014 about MPR, DPR, DPD, and DPRD (MD3) and through the verdict of the Constitutional Court twice with No. 92 / PUU-X / 2012 and resolution No. 79 / PUU-XII / 2014. One of the excess functions of the National Assembly of the French Republic is to be able to formulate and establish laws.

Keyword : *Indonesia, French, Representative Institutions*

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya, segala puji bagi Allah kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam kitab-Nya yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Q.S Al-Ahzab [33] : 70-71

Adapun selanjutnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda yang artinya *“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk, adalah petunjuk Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan (dalam agama), dan semua perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka”*

Hadits Shahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad (1/392-393) dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas’ud *Radiallahu ’anhu*

Alhamdulillah, dengan taufiq, pertolongan, dan rahmat dari Allah *Azza Wajalla*, tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2019 telah berhasil diselesaikan, dengan judul **“Analisa Perbandingan Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Majelis Nasional Republik Prancis Dan DPD RI”**

Penulis haturkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. –*semoga Allah menjaganya-*
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. –*semoga Allah menjaganya-*
3. Bapak Muhammad Helmi Fahrozi, SHI, S,H., M,H., atas jasanya dan dengan penuh kesabaran dalam membimbing skripsi penulis –*semoga Allah menjaganya-*
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat untuk penulis. –*semoga Allah menjaganya-*
5. Ibu Salvia Thalib, dan Ibu Endang Ketut Setyowati atas curahan rintihan permohonan doanya kepada ia yang Maha Tinggi. Semata-mata untuk kesuksesan, kemajuan, motivasi, dan cinta yangng tidak mengenal lelah untuk penulis. –*semoga Allah menjaganya-*
6. Kedua kakak lak-laki penulis yang senantiasa memberikan dukungan penulis baik secara materiil maupun formil –*semoga Allah menjaganya-*
7. Rekan-rekan Lokal A 2016 selaku penyokong dalam kegiatan menuntut ilmu penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2016 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, selaku kontribusi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di Kampus.
9. Organisasi Hukum Tata Negara 2016 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, sebagai media kemudahan penulis dalam mengikuti kegiatan di luar Kampus.
10. Para sahabat penulis *asatidz* atau *asatidzah* Mua’sah Al Hisbah, selaku pembimbing spiritual penulis. –*semoga Allah menjaganya-*
11. Euodia Octavia Sitompul, Nesia Aldi Syavira, Divia Natasha Nuzulia dan Alya Syavira Permana sahabat penulis selama menjelang sidang skripsi penulis, atas doa dan motivasinya semoga keberkahan kehidupan selalu tercurah untuknya dan keluarga.

12. Maulana Satya Arrumi Rinanto, Ricky Alfayedi Pratama, Muhammad Fikri Aulia, selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan materiil, formil dan spiritual dalam keseharian penulis yang penuh dengan empati maupun simpati untuk kemudahan penulis untuk menggapai gelar sarjana penulis, semoga Allah senantiasa memberikan taufiq, hidayah, dan rahmatnya kepada mereka dan keluarga.

Penulis telah berusaha dengan keras untuk kesempurnaan skripsi ini, *Tak ada gading yang tak retak* penulis menyadari tulisan ini tentu masih menyimpan kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya, akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 03 April 2020

Mochamad Naufal Aripin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Ruang Lingkup Penulisan	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6 Metode Penelitian	17
I.7 Sitematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS DAN DPD RI	20
II.1. Sejarah Majelis Nasional Republik Prancis	20
II.2. Struktur dan Komposisi Parlemen	22
II.3. Area Tanggung Jawab Majelis Nasional Republik Prancis	23
II.4. Peran Parlemen Daloam Konsotitusi.....	25
II.5. Karakteristik Majelis Nasional	30
II.6. Proses Legislasi Undang-Undang.....	31
II.7. Sejarah DPD RI	33
II.8. Struktur Dan Komposisi DPD RI.....	34
II.9. Area Tanggung Jawab DPD RI	35

II.10. Peran Kerja DPD Konstitusi	37
II.11. Karakteristik DPD RI	39
II.12. Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia	40
BAB III PERBANDINGAN KEWENANGAN LEGISLASI DPD RI DENGAN MAJELIS NASIONAL REPUBLIK PRANCIS	42
III.1. Meneropong Kewenangan DPD RI Dalam Konstitusi RIS	42
III.2. Menelaah Kewenangan Majelis Nasional Republik Prancis	46
III.3. Penguatan DPD RI Dan Keutamaan Fungsi Legislasi Kamar Kedua.....	47
III.4. Perbandingan Kewenangan Majelis Nasional Dan DPD RI.....	51
BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU- XII/2014	53
IV.1. Perkembangan DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	53
IV.2. Kemanfaatan Penguatan Fungsi Legislasi DPD RI	56
IV.3. Pasal Mereduksi Perkembangan DPD RI	59
IV.4 Analisa Putusan Pasal Mahkamah Konstitusi.....	62
BAB V KESIMPULAN	64
V.1. Kesimpulan	64
V.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP.....	70
BERITA UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	
LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI.....	
REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI.....	
KARTU MONITOR BIMBINGAN SKRIPSI	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Tugas Parlemen.....	29
---	----